



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LERENG  
KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

ALFI ROZA

11675102273

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**



## LEMBARAN PERSETJUAN SKRIPSI

Nama

: Alfi Roza

Nim

: 11675102273

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Administrasi Negara

Judul

: Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan  
Kuok Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh

Afrizal. S.Sos. M.Si

NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin. S.Sos. M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Muh. Said HM. M.Ag. MM

NIP. 19620512 198903 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ALFI ROZA  
 NIM : 11675102273  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA LERENG  
 KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR  
 TANGGAL UJIAN : 22 APRIL 2021

Disetujui Oleh :

Ketua Penguji

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

Mengetahui :

Penguji I

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji II

Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP  
 NIP. 19810505 200604 2 006



# ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LERENG, KECAMATAN KUOK, KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

**ALFI ROZA**  
**11675102273**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Adanya dana desa yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang diurungkan dari APBN yang bertujuan untuk memajukan desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintahan kabupaten/kota selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. wawancara, dokumentasi. *Key Informen* dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Dalam penelitian ini berdasarkan indikator Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Belum berjalannya system transparansi secara efektif, Masi berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis sudah baik, tetapi dalam hal pelaporan masi kurang baik dikarenakan masi adanya pegawai desa yang bermalas-malasan didalam pekerjaannya menyebabkan kelambatan didalam pembuatan laporan.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Dana Desa, Desa Lereng.*





## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Puji syukur kehadiran *Allah swt.* atas rahmat dan karunia-Nya yang tidak terkira. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam stetulus hati kepada baginda *Nabi Muhammad saw.* dan ahlul baitnya, sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM. M.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis menimba banyak ilmu disana
- Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Bapak Dr. Jhon Afrizal, SHL., MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria
- Ibu Irdyanti, S.Ip., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademis, yang yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini
- Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda Zulfikri dan Ibunda Endra Mainis yang selalu mendukung kegiatan perkuliahan dalam bentuk moral dan materil

Kepala Desa Lereng Bapak Syarwansa, SE.

0. Sobat Kajian, Wahyudi Jamal, Agus Riyadi, Lesi Andrea Lestari, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini.

1. Rekan-rekan seperjuangan penulis dan sahabat bertukar pikiran Aldian Anggi Saputra dan Akhmad Tumarno selama penulisan skripsi.

2. Seluruh teman Ilmu Administrasi Negara Lokal D.16 tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.

3. Semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, juni 2021

**ALEFI ROZA**  
NIM. 11675102273

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar isi**

<b>Persetujuan</b>	
<b>Pengesahan</b>	
<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah .....	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1.Otonomi Desa .....	11
2.2.Pengelolaan Keuangan Desa .....	16
2.3.Dana Desa .....	19
2.4.Desas .....	22
2.5.Perspektif Islam .....	30
2.6.Penelitian Terdahulu .....	32
2.7.Defenisi Konsep.....	33
2.8.Konsep Operasional.....	35
2.9.Kerangka Pemikiran .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.2.Jenis Penelitian.....	38
3.3. Sumber Data.....	38
3.4.Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5.Informan Peneletian .....	40
3.6.Analisis Data.....	40



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1. Sejarah Desa.....	42
1.2. Keadaan Wilayah.....	46
1.3. Kependudukan.....	47
1.4. Mata Pencaharian.....	48
1.5. Agama Masyarakat Desa Lereng .....	49
1.6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	50
1.7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	51
1.8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) .....	52

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian .....	53
5.2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Lereng .....	63

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	69
6.2. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa di Desa Lereng 2016-2020 .....	4
Tabel: 3.1 Key Informan .....	4
Tabel 4.1 Panitia Pemekaran Desa .....	42
Tabel 4.2 Pejabat Sementara Desa Lereng 2007 .....	43
Tabel 4.3 Geografis Desa Lereng .....	46
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.5 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	48
Tabel 4.6 Mata Pencarian Masyarakat Desa Lereng .....	49

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Gambar**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lereng.....	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPD Desa Lereng .....	51
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat..	52



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pada pasal 1(satu) ayat 2 (dua), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya undang-undang tentang desa. Dengan terbentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Memberi harapan baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang ditanda tangani oleh presiden ke-6 RI, yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini membuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana desa serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat desa. Beberapa tujuan yang terdapat dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan public guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1 Kewenangan berskala asal usul
- 2 Kewenangan lokal berskala desa
- 3 Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota
- 4 Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usun dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan didalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat bertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1(satu) pada ayat 6(enam) dan 8 (delapan) tentang APBN dan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya sesuai dengan aturan dari undang-undang, itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, di setiap desa diberikan Dana

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, berdasarkan dari data Dana yang ada di Desa pada tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Dana Desa di Desa Lereng 2016-2020**

No	Tahun	Dana Desa	Program kerja	Biaya
1	2016	Rp. 600.864.000	1. Semenisasi jalan	Rp. 162.620.000
			2. Pembangunan drainase	Rp. 157.096.000
			3. Renovasi gedung kantor desa	Rp. 39.675.500
			4. Pembangunan turap	Rp. 107.522.500
			5. Pemasangan lampu jalan	Rp. 9.925.400
			6. Pembangunan bangunan MCK	Rp.18.991.100
			7. Pembangunan duker	Rp. 16.033.500
			8. Penyertaan modal ke BUMDes	Rp. 89.000.000
			<b>Total</b>	<b>Rp. 600.864.000</b>
2	2017	Rp. 764.677.000	1. Jasa upah tenaga kerja pegawai	Rp. 8.100.000
			2. Semenisasi jalan	Rp. 238.888.000
			3. Pembangunan kawat jaring	Rp. 109.865.000
			4. Pemasangan lampu jalan	Rp. 10.675.000
			5. Pembuatan tempat sampah permanen	Rp. 29.510.000
			6. Semenisasi halaman posyandu	Rp. 21.361.000
			7. Pembangunan tower air bersih	Rp. 20.734.000
			8. Pembangunan drainase	Rp. 280.577.000
			9. Pembangunan turap	Rp. 44.967.000
			<b>Total</b>	<b>Rp. 764.677.000</b>
3	2018	Rp.671.568.000	1. Belanja jasa upah tenaga kerja	Rp. 160.114.000
			2. Belanja honorarium tim panitia	Rp. 24.740.764

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			3. Pembangunan drainase 4. Semenisasi jalan 5. Pembelian meja pimpong 6. Pembayaran guru ngaji 7. Pembelian angkutan sampah 8. Pembelian bibit jambu kristal 9. Tambahan modal bumdes	Rp. 198.044.000 Rp. 157.351.000 Rp. 16.000.000 Rp. 7.200.000 Rp. 45.000.000 Rp. 30.100.000 Rp. 33.018.236
			<b>Total</b>	<b>Rp. 671.568.000</b>
4	2019	Rp. 752.896.000	1. Pembayaran guru ngaji 2. Pembangunan lokal PDTA 3. Pengelolaan perpustakaan milik desa 4. Bantuan operasional posyandu 5. Semenisasi jalan 6. Honor petugas penertiban sampah 7. Kegiatan pembersihan limbah 8. Pembuatan tower air bersih 9. Pembangunan drainase 10. pembelian perlengkapan olahraga 11. kegiatan pelatihan menjahit	Rp. 14.400.000 Rp. 137.360.605 Rp. 16.552.400 Rp. 7.200.000 Rp. 303.706.520 Rp. 14.800.000 Rp. 18.112.500 Rp. 14.943.075 Rp. 158.295.900 Rp. 10.000.000 Rp. 57.525.000
			<b>Total</b>	<b>Rp. 752.896.000</b>
5	2020	Rp. 757.757.000	1. pembayaran guru ngaji 2. pembayaran honorarium petugas posyandu 3. perlengkapan penanggulangan covid19	Rp. 14.400.000 Rp. 4.800.000 Rp. 43.881.709



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		4. penanggulangan stunting	Rp. 24.761.031
		5. semenisasi jalan	Rp. 182.888.310
		6. penyiraman aspal jalan semenisasi	Rp. 27.031.750
		7. pembangunan drainase	Rp. 76.787.200
		8. honor petugas penertiban sampah	Rp. 14.800.000
		9. penanggulangan bencana	Rp. 100.000.000
		10. belanja tidak terduga keadaan mendesak desa	Rp. 268.407.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 757.757.000</b>

Sumber: APBDes 2016-2020 desa lereng

Berdasarkan dari tabel diatas Dana Desa Pada tahun 2016 desa lereng menerima DD sebesar 600.864.000 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di desa tidak cukup pada tahun sebelumnya dan masi banyaknya masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut atau masih didalam kategori swadaya, pada tahun 2018 Dana Desa mengalami penurunan karna didalam data yang diberikan sesuai dengan kondisi desa kembali dikategorikan swakarya dan pada tahun 2019 kembali naik karena data dari desa dikategorikan swadaya, pada tahun 2020 desa mengalami kenaikan penerimaan dana desa karena selain untuk pembangunan-pembangunan dan dana desa juga diperuntukkan untuk penanganan covid19, apabila desa sudah dikategori swasembada maka desa tersebut sudah dikatakan maju, tentu itu diperhitungkan dengan keadaan desa dan kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan yang ada di desa.

Dana desa merupakan dana yang diturunkan dari APBN yang bertujuan untuk memajukan desa, setiap desa mendapatkan tiap-tiap anggaran, berdasarkan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengamatan dari peneliti dilokasi penelitian, peneliti mengangkat judul ini karna ingin mengetahui bagaimana pengelolaan didesa yang diteliti, karena Dana Desa ini diturunkan ke desa setiap tahunnya, penelitian ini agar dapat mentransferkan laporan-laporan yang dipaparkan oleh pemerintahan Desa di dalam rekapitulasi dana didesa, ini bertujuan apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, karena sebelum-sebelumnya penulis sendiri mendengarkan adanya beberapa laporan dari penduduk yang ada di desa sebagai berikut :

1. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan anggaran.
2. Adanya isu penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan.
3. Sarana informasi laporan yang diberikan tidak bersifat continue.

jadi dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mentransferkan laporan anggaran-anggaran yang ada di desa yang diteliti ini kepada masyarakat, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang telah lalu sesuai dengan isu-isu yang ada, pengamatan dari peneliti dari tahun ke tahun ditempat penelitian ini, sudah mulai membaik, sudah banyak melakukan pembaharuan dan pembangunan sedikit demi sedikit, baik dalam tata pelayanannya kepada masyarakat desa, baik dalam pelayanan pendataan penduduk maupun layanan kesehatan yang diberikan kepada balita-balita dan lansia yang ada di desa yang di teliti ini, sedangkan dalam pembangunannya sudah mulai ada perubahan secara perlahan, yang dulunya gang-gang yang sempit dan jalan yang bebatuan atau tanah dan mudah tergenang air ketika hujan, sehingga membuat akses agak susah untuk dilalui apalagi cuaca hujan, dan sekarang sudah mulai melakukan perbaikan dengan memperbesar

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gang-gang, melakukan semenisasi dan membuat drainase untuk melancarkan aliran air dan membuat akses interaksi masyarakat-masyarakat yang ada didesa penelitian ini menjadi mudah.

Berdasarkan dengan banyaknya dana keuangan yang di turunkan ke desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan, maka pemerintah desa harus sesuai menjalani pemanfaatan keuangan desa tersebut dengan sebaik mungkin tentu dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, seperti pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Dalam keadaan seperti ini maka sangat penting diadakan pengawasan yang ketat, Dalam beberapa situasi pada waktu yang telah lalu-lalu dan kebanyakan yang terjadi juga di berbagai desa, penggunaan Dana Desa sangat rawan terhadap penyelewangan. Pembangunan yang di lakukan tidak sesuai dengan anggaran yang ada, pihak yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, kini banyak yang memanfaatkan situasi yang ada demi keuntungan dengan memakan uang bantuan dari Negara yang di turunkan ke desa-desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintahan kabupaten/kota selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian proses pencanaannya, pengelolaannya, hingga pelaporannya harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku, sehingga nantinya diharapkan dana yang tidak sedikit ini dapat digunakan pada jalurnya, agar menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa demi terwujudnya keadilan serta

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa menjadi maju dan berkembang.

Berdasarkan dari uraian di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat penelitian ini dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar**”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar ?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi pemerintahan desa lereng dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi pemerintah desa lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti yang lain yang berfokus pada kajian pengelolaan dana desa.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pengelolaan dana desa.

## Sistematika Penulisan

Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Secara sistematis susunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasar diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan.

### BAB II: LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pandangan islam, definisi konsep dan kerangka pemikiran.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, penentuan populasi sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

### BAB V: DAFTAR PUSTAKA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Beratha (1991: 124) merupakan otonomi yang tumbuh dalam tradisi atau hukum adat/asli Indonesia, lebih jelasnya Beratha mengemukakan bahwa :

“Otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat”.

Sedangkan menurut zakaria, 2001. (dalam tesis firmanudin 2005:10), “Bila dilihat dengan menggunakan pendekatan teori politik – hukum, otonomi desa identic dengan atau dapat digolongkan kedalam hak yang bersifat bawaan, yakni hak yang telah tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam suatu kelembagaan (institusi) yang merupakan urusan rumah tangga sendiri”.

Mengacu kepada pernyataan kedua ahli di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa otonomi desa merupakan hak bawaan, yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan berkembangnya suatu kesatuan masyarakat desa serta terpelihara menjadi urusan rumah tangga desa itu sendiri, jadi, otonomi desa pada dasarnya adalah hak atau kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat pada suatu kesatuan wilayah dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi pemerintahan yang dikenal dengan sebutan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor system demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah Negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat disetiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit

Pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang RI tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

### 2.1.1 Otonomi Desa Sebelum Kemerdekaan

Pada tahun 1906 Pemerintahan Kolonial belanda mengeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonantie Java En Madoera disingkat IGO, ialah UU tentang Desa yang berlaku untuk jawa dan Madura kemudian pada tahun 1936 dikeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten, disingkat IGOB adalah UU tentang desa yang berlaku untuk daerah diluar jawa dan Madura, jadi





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ordnansi/undang-undang yang mengatur desa di Jawa dan Madura adalah IGO, sedangkan yang mengatur desa diluar Jawa dan Madura adalah IGOB.

Pada tahun 1941 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordnansi/undang-undang desa yang terkenal dengan sebutan desa Ordonnantie. Berdasarkan ordnansi ini status desa diperkuat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih otonom. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai subordinat dari kekuasaan di atasnya tapi diakui sebagai lembaga otonom pribumi yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, namun pengaturan tersebut bukan untuk transformasi demokrasi pada masyarakat desa, namun merupakan taktik Belanda untuk mempertahankan status kekuasaan. Pemerintahan colonial yang menganut system liberal. Desa Ordonnantie tidak sempat dilaksanakan karena Hindia Belanda keburu kalah melawan tentara Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

### 2.1.2 Otonomi Desa Pada Masa Orde Lama

Tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan, diundangkan UU. No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Menurut UU ini desa ditetapkan sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, pada pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa daerah NKRI tersusun dalam tiga tingkatan : Provinsi, Kabupaten (kota besar), dan Desa (kota kecil), nagari, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut UU ini desa diposisikan sebagai daerah otonom tingkat III, akan tetapi kebijakan ini dapat berjalan dikarenakan kondisi Negara kita masih menghadapi ancaman Belanda dan belum dalam keadaan stabil, pada tahun 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1965 tentang desapraja. Pada pasal 1 UU ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan desapraja, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasaanya dan mempunyai harta benda sendiri.

Desapraja menurut UU ini menunjukkan pada suatu kesatuan masyarakat hukum yang sengaja akan dibentuk kemudian untuk dipersiapkan menjadi daerah tingkat III. Dalam perjalanannya nasib Undang-Undang ini juga sama dengan UU No. 22 Tahun 1948, belum pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, isi, bentuk dan mekanisme penyelenggaraan rumah tangga desapraja juga belum pernah dilaksanakan. (Nurcholis 2011:60-61).

### 2.1.3 Otonomi Desa Pada Masa Orde Baru

Dibawah pemerintahan Soeharto semua produk hukum masa orde lama ditinjau ulang, salah satunya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang desapraja dinyatakan tidak sah, pemerintahan orde baru mencabut UU tersebut dengan UU Nomor 6 Tahun 1969. Mulai saat itu, dasar hukum pemerintahan desa menjadi tidak jelas, untuk mengatasi kekosongan landasan hukum tentang desa, dikeluarkanlah surat edaran Mendagri Nomor 5/1/1969, tanggal 29 april 1969 tentang pokok-pokok pembangunan desa. Dalam surat edaran tersebut desa di beri pengertian:

“desa dan daerah yang setingkat adalah kesatuan masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) baik geneologis maupun territorial yang secara hirarkis pemerintahannya langsung dibawah kecamatan”.

Setelah mengalami kevacuman selama 10 tahun barulah pada tahun 1979



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
© UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, UU ini secara formal mendefenisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada di bawah kecamatan.

### 2.4 Otonomi Desa Pada Masa Reformasi

Mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen Pasal 18 dan 18A, dan 18B yang berbunyi :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang- undang.
2. Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat and prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi sebelum UUD 1945 diamandemen dikeluarkanlah UU/22/1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU/25/1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai acuan dalam mengatur pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Desa. Kemudian UU/22/1999 diganti dengan UU/32/2004 sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut serta UU/25/1999 diganti dengan UU/33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam Undang-undang tersebut status desa dikembalikan sebagai Kesatuan masyarakat Hukum adat yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian Desa mempunyai Otonomi, yang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri juga berhak aturannya sendiri. Hanya saja otonomi desa bukan otonomi formal tapi otonomi adat.

Jadi kehadiran undang-undang ini telah mengembalikan hak-hak otonomi desa yang selama ini berada di bawah camat, sehingga desa bisa dengan leluasa mengatur dirinya sendiri dalam urusan asal-usul dan adat istiadat dan seterusnya.

Sekarang pada masa orde reformasi melalui undang-undang Nomor 22 tahun 1999 otonom desa dikembalikan lagi dengan pengakuan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dalam pengelolaan yang lebih bersifat demokrasi, maka kepala desa dan perangkatnya beserta unsur-unsur pemerintahan yang ada memiliki peran yang kuat dalam pengendalian pemerintahan di desa. Namun system ini tidak berlangsung lama, berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 desa kembali diartikan sekedar saluran birokrasi dan administrasi kewenangan Negara melalui kabupaten dan kota, desa menjadi perpanjangan tangan kebijakan-kebijakan pemerintah, hanya saja dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 207 ini desa masih memiliki hak untuk menolak pelaksanaan tugas perbantuan bagi tugas yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

## 2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pencapaian tujuan.

Menurut Harsoyo (1977: 121) “pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Jadi, pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas- asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraianannya sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: miik UIN Suska Riau

1. penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas (cash basis). Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Apapun siklus pengelolaan keuangan dana desa, sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta: milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yangdianggarkan dalam APBDDes.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.

Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan, dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

#### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan keuangan, kaur keuangan desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaanpotongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4 Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan Pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

#### 5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan pertanggung jawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggung jawaban kepada bupati/wali kota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus membuat laporan APBDes, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

#### 2.3 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias sempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal dana desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

### 2.3.1 Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
3. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 sampai 5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang di bagi rata.
4. Kewenangan desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
5. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran masyarakat desa.
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
7. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumber daya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari masyarakat dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputas secara berkelanjutan di wilayah desa atau daerah kabupaten/kota.
8. Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.
9. Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam pasal 4 BAB III peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Prioritas pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang
3. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.

## 2.2 Good Governance

Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintahan yang menjadi agen perubahan (agent of change) dan agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki (agent of development), yakni pemerintah harus untuk mendorong

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan industry-industri dan perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui budget. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada ditangan pemerintah.

Berikut adalah karakteristik pelaksanaan Good Governance :

1. Partisipasi (participation). Ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasinya.
2. Supremasi hukum (rule of law). Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu atau membedakannya.
3. Transparan (transparency). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan bersama secara langsung dapat diperoleh oleh setiap yang membutuhkan.
4. Responsivitas (responsiveness). Lembaga-lembaga public harus cepat tanggap dalam melayani pemangku kepentingan.
5. konsensus orientasi (consensus of orientation). Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Keadilan (equity). Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness). Pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
8. Akuntabilitas (accountability). Pertanggungjawaban kepada public atas setiap





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

aktivitas yang dilakukan.

9. Visi strategis (strategic vision). Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

#### 4. Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa) atau desa Merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Berikut menurut pendapat para ahli tentang desa sebagai berikut :

1. Menurut Bintarto, desa adalah kesatuan atau perwujudan dari geografi,

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta: milik UIN Suska Riau

ekonomi, sosial, politik, dan kultural dalam hubungan serta pengaruhnya terhadap daerah yang lainnya yang terdapat di dalam suatu daerah tertentu.

2 Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa merupakan suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

3 Menurut P.J. Bournen, desa merupakan salah satu bentuk dari kehidupan bersama sebanyak ribuan orang, akan tetapi hampir semuanya dari mereka saling mengenal. Selain itu, kebanyakan dari mereka hidup dengan matapencaharian perikanan, pertanian serta usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Berdasarkan uraian di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah di bawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat, desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya.

## 2.1 Penataan Desa

Menurut Undang-Undang republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 7 menyebutkan bahwa penataan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang republic Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 7 tentang desa menyebutkan bahwa penataan desa bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
- e. Meningkatkan daya saing desa

## 2.4.2 Kewenangan Desa

Menurut Undang-undang republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan local berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.4.3 Pemerintahan Desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

#### 2.4.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 23 menyebutkan bahwa Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Kepastian hukum
  - b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
  - c. Tertib kepentingan umum
  - d. Keterbukaan
  - e. Proporsionalitas
  - f. Profesionalitas
  - g. Akuntabilitas
  - h. Efektivitas dan efisiensi
  - i. Kearifan local
  - j. Keberagaman
  - k. Partisipatif

#### 2.4.5 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Dan menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja pemerintah desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### b Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing- masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.

#### c Pelaksana kewilayahan

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing- masing seksi dipimpin oleh kepala seksi. Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### d Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing- masing dipimpin oleh kepala seksi.

Dilanjutkan menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah desa menyebutkan bahwa tugas dan fungsi pemerintahan desa yaitu sebagai berikut :

#### a. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan ketenagakerjaan.

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sekretaris desa mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa. Perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

laporan.

c. Pelaksana kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menunjang lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

d. Pelaksana teknis

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### 2.5 Perspektif Islam

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam Agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan dari ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan tentang pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Selanjutnya tentang keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran, sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hambanya apalagi seorang pemimpin untuk berbuat adil dalam melaksanakan segala aspek



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan terlebih lagi dalam pemerintahan, seorang pemimpin harus bisa berlaku adil agar menciptakan kententraman dan tidak adanya kecemburuan sosial, adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak dan kewajiban sesama insan.

Dan setelah itu pemerintahan desa atau seorang kepala harus Tanggung jawab atau amanah, untuk memakmurkan desa, setiap pelaku yang bertugas mengelola dana desa memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar dalam mengelola dana desa tersebut, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ



أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat diatas menegaskan bahwa, amanah tidak hanya menyangkut tentang urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik saja. Kata-kata adalah amanah, memperlakukan insan dengan baik itu juga amanah. Amanah merupakan tuntutan iman dan Khianat adalah salah satu kekafiran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6 Penelitian Terdahulu

No	Nama/tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fahrul Ridha/2019	Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Langsa Kota Langsa	Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa infrastruktur dan pemberdayaan di bidang umum.	Penelitian ini lebih mengarah ke dalam peningkatan perekonomian masyarakat bukan ke sebuah pelaporan atau informasi pengelolaan dana desa ke masyarakat. Dan lokasi pada penelitian ini berada di kecamatan langsa kota.
2.	Ika Asmawati dan Prayino Basuki/2019	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas keuangan pemerintah desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa melalui pelatihan atau kursus untuk aparat desa serta penyediaan media sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat optimal	Pada penelitian ini lebih mengarah kepada pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Dan penelitian ini berlokasi di desa dore kecamatan palibelo kabupaten bima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Mardiana/ 2017	Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Laiss Kabupaten Musi Banyuasin	Desa Epil menyusun anggaran sesuai dengan rancangan kerja sesuai dengan satu tahun kedepan, selain itu anggaran disusun sesuai posnya masing-masing yang dimulai dari pos kegiatan desa hingga pos biaya-biaya desa.	Pada penelitian ini hanya mencakup pada rancangan kerja yang dikerjakan tiap tahunnya di desanya. Dan lokasi pada penelitian ini berada pada desa Epil kecamatan laiss kabupaten banyuasin
4	Nur Sri Devyana/ 2020	Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)	pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa ngroto sudah dapat mendukung pembangunan dan meningkatkannya pembangunan fisiksaja, tidak merangakup juga kendala-kendala yang ada didesa dan masyarakat. Dengan laporan yang ada nya dana desa transfaransi. yang di dapat desa ngroto dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masayrakat desa.	Penelitian ini hanya berfokus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaannya saja, tidak merangkup juga kendala-kendala yang ada didesa dan masyarakat. Dengan laporan yang ada nya dana desa transfaransi. Dan lokasi penelitian ini berada di desa ngroto kecamatan pujon kabupaten Malang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Solichin dan Samsul Akmal/2018	Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)	persepsi masyarakat dalam pemanfaatannya dana desa tergolong baik dalam pembangunan infrastruktur, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya informasi tentang anggaran dana desa	Pada penelitian ini hanya mencakup persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur saja, tidak mengkaji rincian pengelolaan dana pada tahun 2016 – 2020. Penelitian ini berlokasi di desa dusun baru kecamatan ilir talo kabupaten seluma.
---	--------------------------------	--	---	--

## 2.7 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep karya ilmiah adalah sebagai berikut :

### 1. Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Beratha (1991: 124) merupakan otonomi yang tumbuh dalam tradisi atau hukum adat/asli Indonesia, lebih jelasnya Beratha mengemukakan bahwa :

“Otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa

Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), perwujudannya

tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat”.

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa

pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bias sempurna gagasan para inisiatornya.

## 3. Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

**2.8 Konsep Operasional**

Variable	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Dana Desa	1. Perencanaan	a. Mengetahui mekanisme rancangan perencanaan pengelolaan dana desa b. Meminimalisir pemborosan biaya c. menyatukan kebijakan atau pendapat d. prinsip dan teknis penyusunan
	2. Pelaksanaan	a. Penerimaan dan pengeluaran b. pembuatan rencana anggaran biaya kegiatan c. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan d. melakukan pembangunan desa
	3. Penata usahaan	a. Mengelola keuangan desa b. Pencatatan setiap anggaran masuk dan keluar c. Penutupan buku anggaran biaya

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	4. Pelaporan	a. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada atasan b. mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan c. transparansi
	5. pertanggungjawaban	a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses c. Akuntabel

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

## 9 Kerangka Pemikiran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: permendagri nomor 20 tahun 2018

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu mulai dari bulan oktober 2019 sampai bulan januari 2020 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar” merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan induktif. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaanya dan tinjauan hukum.

Penelitian/ riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran serta metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.





### 3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dengan penelitian yang mana bias dikenal ada 2 (dua) jenis data yaitu primer dan sekunder.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari uraian diatas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan dan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ialah dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Data primer langsung diperoleh dari pemerintahan desa lereng, kecamatan kuok, kabupaten Kampar.

#### 2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan seperti

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RPDES, RKP Des, dan berkas lainnya. Dan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, permendes, permendagri dan buku.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

#### 3.4.1 Pengamatan Langsung

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis langsung akan mengamati bagaimana pengelolaan dana desa lereng, kecamatan kuok, kabupaten Kampar.

#### 3.4.2 Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada responden seputar informasi yang dibutuhkan informasi.

#### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, laporan, serta berupa foto.

### 3.5 Informan Peneletian

Penentuan subjek ini dilakukan berdasarkan metode Purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki Kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik *Key Informen* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah

petjabat desa lereng dan masyarakat desa lereng.

**Tabel: 3.1**  
**Key Informan**

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Lereng	1
2	Sekretaris Desa Lereng	1
3	Bendahara Desa Lereng	1
4	Masyarakat Desa Lereng	2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>5</b>

### 3.6 Analisis Data

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data dan penelitian.
2. Reduksi data yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk dapat dilibatkan dalam penelitian.
3. Penyajian data yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan tahap akhir dalam proses data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan sebagai bentuk proses pengajuan data. Data yang disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Sugiyono (2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu obyek penelitian yang dahulu masih terlihat samar dan gelap.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1. Sejarah Desa

Desa Lereng merupakan pemekaran dari Desa Merangin, pada awalnya dahulu Desa Lereng merupakan sebuah nama Dusun yang ada di Desa Merangin. Seiring dari pada perkembangan zaman, luas wilayah dan perkembangan penduduk semakin pesat dan disertai dengan semakin banyaknya para pendatang yang bermukim di Desa Lereng, baik yang datang dari Wilayah Kecamatan, Kabupaten, Propinsi seperti dari Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa dan lain sebagainya. Pada tahun 2005 Desa Merangin yang dikepalai oleh Drs. Zulfahrizal, maka timbullah wacana untuk mengadakan pemekaran Desa Merangin menjadi tiga Desa diantaranya Desa Lereng, Desa Pulau Terap, Desa Merangin yang merupakan desa lama. Tanpa ada sebab wacana tersebut terhenti lebih kurang selama 2 tahun sampai kepemimpinan desa Merangin yang dikepalai oleh Muhammad Kamil pada tahun 2007 tepatnya pada bulan juni, maka wacana itu pun mulai kembali digulirkan ditengah-tengah masyarakat baik itu melalui rapat- rapat resmi maupun rapat tidak resmi. Melalui rapat inilah pemekaran desa pada bulan januari 2007 dengan tekad dari seluruh lapisan masyarakat serta dukungan dari Camat Bangkinang Barat Bapak Afrizal, S.Sos dengan semangat dan tekad yang kuat maka dibentuklah kepanitiaan inti pemekaran Desa Merangin sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**  
**Panitia Pemekaran Desa**

NO	NAMA	JABATAN
1	Syafrizal Hasan	Ketua BPD Merangin
2	Yurnalis	Unsur Ninik Mamak
3	H. Kasru	Unsur Tokoh Masyarakat
4	Alm.Drs. Zainal Mesir	Unsur Tokoh Agama
5	Yohana	Unsur Darmawanita

Disamping itu pemekaran desa yang dibentuk di Desa Merangin, maka dari masing-masing desa yang hendak dimekarkan dari Desa Merangin membentuk sebuah tim yang terdiri dari 7 orang, adapun Nama-nama tim dari Desa Lereng adalah sebagai berikut:

1. Ikhsan N, ST.
2. Jumaris
3. Syaharuddin, A.Ma.
4. Khaidir
5. Alm. Drs. Zainal Mesir
6. Djuma'adin
7. Hj. Yusmidah.

Dari ketujuh tim tersebut melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, maupun dengan pemerintah kabupaten beserta Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dalam hal pemekaran desa. Disamping itu persyaratan sebagai desa pemekaran tim tujuh tersebut mulai mempersiapkan untuk menjadi pejabat sementara di desa lereng yang terdiri dari Pjs. Kepala Desa, Perangkat Desa , Kepala Dusun, serta terdiri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 8 RW dan 17 RT.

Berikut pejabat sementara (PJS) desa Lereng Tahun 2007 :

**Tabel 4.2**  
**Pejabat Sementara Desa Lereng 2007**

No	Nama	Jabatan
1	Asril, S. Ag	Pjs. Kepala Desa
2	Ikhsan N, ST	Pjs. Kadus Sungai Deras
3	Abdul Hakim	Pjs. Kadus Lereng
4	Alm. Drs. Zainal Mesir	Pjs. Kadus Sopang
5	Apratiswan, S.Pd	Pjs. Kadus Rimbo Tampui

Pada bulan September tahun 2007, hasil perjuang tim desa lereng serta diiringi do'a dari masyarakat mulailah membuahkan hasil dengan kunjungan dari tim verifikasi Kabupaten Kampar yang terdiri dari bagian pemerintahan desa, BPN Kabupaten untuk mengukur wilayah serta pembentukan peta wilayah desa Lereng dan batas-batas wilayah dengan desa lainnya. Pada bulan Desember tahun 2007 maka diakuilah desa Lereng sebagai salah satu desa persiapan melalui sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Surat Bupati Kampar Nomor: 36 Tahun 2007 serta surat keputusan Pengangkatan Asril, S.Ag sebagai Pjs. Kepala Desa Lereng dengan nomor: 141/Pem/637/2007 yang dilantik pada tanggal 28 Januari 2008 yang bertempat di Kantor Camat Bangkinang Barat, dan di Desa Lereng terdiri dari IV dusun yaitu Dusun I (lereng), Dusun II (Sopang), Dusun III (Rimbo Tampui) dan IV (Sungai Deras).

Pelaksanaan pemerintahan desa persiapan di kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan desa,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan dijabarkan lebih jauh oleh perda Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2007 tentang badan permusyawaratan desa. Pada tahun 2008 dilaksanakan Evaluasi teknis terhadap 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa persiapan di Kabupaten Kampar yang tersebar di 11 (Sebelas) Kecamatan. Desa persiapan Lereng Kecamatan Bangkinang Barat merupakan salah satu dari 29 Desa persiapan di Kabupaten Kampar yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dari desa induk merangin, dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 4 Oktober 2007 dan diresmikan pada Tanggal 29 Januari 2008.

Tujuan Evaluasi teknis guna mendapatkan data-data dan Gambaran kondisi akhir Desa persiapan Lereng. Data ini akan menjadi bahan pertimbangan secara teknis dalam proses peningkatan status Desa Persiapan Lereng menjadi Desa Depenitif.

Evaluasi teknis pada desa persiapan Lereng dilaksanakan dengan metoda peninjauan kedesa oleh Tim, melakukan pendataan, inventarisasi dan wawancara dengan seluruh Aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa yang telah dibentuk dan disahkan. Hal-hal yang menjadi sasaran evaluasi teknis meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek Wilayah
2. Aspek Administrasi Pemerintahan atau Tata Usaha Perkantoran kantor Desa persiapan Lereng
3. Aspek Penduduk
4. Aspek Infrastruktur meliputi Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pendukung lainnya untuk kelancaran Pemerintahan Desa.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasil peninjauan oleh Tim tersebut, kemudian disusun oleh bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar menjadi Evaluasi teknis yang menjabarkan secara sistimatis dan actual, aspek-aspek diatas dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi.

Evaluasi teknis terhadap pelaksanaan pemerintahan desa persiapan Lereng dilaksanakan dalam dua tahap peninjauan. Peninjauan pertama yang menjadi rona awal evaluasi dilaksanakan oleh tim pada tanggal 6 sampai dengan 8 maret 2008, peninjauan awal ini dilaksanakan oleh tim kepada pejabat sementara kepala desa persiapan lereng dalam rangka perbaikan terhadap kekurangan atau hal-hal yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa persiapan Lereng berdasarkan UU Nomor 72 Tahun 2005.

Peninjauan kedua yang merupakan rona akhir evaluasi dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Kampar pada Tanggal 19 Sampai dengan 21 juni 2008 kedesa persiapan lereng dalam rangka penilaian akhir dari kesiapan desa persiapan lereng, untuk mendaptkan data konkrit dan pasti, tim mendata langsung, mewawancarai aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa persiapan lereng.

Desa persiapan lereng kecamatan bangkinang barat dibentuk dengan peraturan bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 4 oktober 2007 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005. Desa Persiapan lereng diresmikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Tanggal 29 Januari 2008, sekaligus dilaksanakan pelantikan pejabat sementara Kepala Desa Persiapan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintahan desa persiapan lereng berdasarkan keputusan bersama masyarakat telah menetapkan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Pemerintahan Desa, ketua dan anggota Lembaga Pembangunan Masyarakat (LPM), ketua dan pengurus Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Aparatur Pemerintahan desa dan Lembaga pemerintahan desa telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa persiapan Lereng, khusus untuk lembaga BPD keputusan Kepala Desa telah disahkan oleh Bupati Kampar dan Lembaga LPM telah disahkan oleh BSPPM Kabupaten Kampar sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 72 Tahun 2005 dan Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007.

#### 4.2 Keadaan Wilayah

Desa Lereng terletak pada wilayah yang strategis dan bisa dijangkau dari berbagai arah ada mata angin, hal itu disebabkan oleh posisi yang melintasi jalan negara yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Propinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga menghubungkan jalan lintas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rohul. Secara geografis di desa lereng ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 50 Meter dan suhu udara rata-rata 23 derajat celcius sampai dengan 33 derajat celcius, geologi dan tanah sebagian besar berwarna kuning, hitam, abu-abu dan tekstur tanahnya lumpur dan pasir, dan secara rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3**  
**Geografis Desa Lereng**

No	Uraian
1	Luas wilayah : 2259 Ha Dusun I (Lereng) : 750 Ha Dusun II (Sopang) : 500 Ha Dusun III (Rimbo Tampui) : 659 Ha Dusun IV (Sungai Deras) : 350 Ha
2	Batas Wilayah Utara : Desa Pulau Terap Selatan : Desa Pulau Terap Barat : Desa Pulau Terap Timur : Desa Kuok
3	Orbilasi Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2,5 Km Jarak dari ibu kota Kabupaten : 15 Km Jarak dari ibu kota Provinsi : 70 Km

Sumber: Kantor Desa Lereng tahun 2020

Berdasarkan dari tabel diatas bahwasannya Desa lereng terdiri dari IV dusun dan memiliki Luas wilayah 2259 Ha, Desa Lereng terletak di kecamatan Kuok, Kabupaten kampar, Provinsi Riau. Hingga saat ini akses-akses transportasi umum dari desa ke Ibu kota Kecamatan yaitu berkisar 3 (tiga) menit dengan kecepatan 30 km/h dengan kendaraan pribadi yang jaraknya 2,5 Km dan akses menuju ke ibu kota Kabupaten berkisar 20 (dua puluh) menit dengan kecepatan 60-80 Km/h dengan kendaraan pribadi yang jaraknya 15 Km dan akses dari desa ke ibu Kota Provinsi riau yaitu berkisar 90 (Sembilan puluh) menit dengan rata-rata kecepatan 80-90 Km/h dengan kendaraan pribadi yang jaraknya 70 Km.

#### 4.3 Kependudukan

Kependudukan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Dengan adanya data kependudukan yang valid tentunya akan sangat penting untuk berbagai kebutuhan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pemerintahan.

Adapun jumlah penduduk yang ada di desa Lereng Kecamatan kuok kabupaten kampar dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.279 Jiwa	51.2%
2	Perempuan	1.218 Jiwa	48.8%
<b>Jumlah</b>		<b>2.497 Jiwa</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Desa Lereng tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya dari jumlah jiwa yang banyaknya mencapai 2.497 yang berada didesa lereng, lebih dominan kepada kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuannya, yang mana dengan lebih banyaknya kaum laki-laki dibandingkan perempuan tadi diharapkan proses didalam pembangunan-pembangunan didesa menjadi lebih cepat dan pesat perubahannya dari tahun ketahun.

**Tabel 4.5**  
**Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 Tahun	182 Jiwa	7%
2	6 – 15 Tahun	274 Jiwa	11%
3	16 – 25 Tahun	449 Jiwa	18%
4	26 – 55 Tahun	1.344 Jiwa	54%
5	56 Tahun Keatas	248 Jiwa	10%
<b>Jumlah</b>		<b>2.497 Jiwa</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Desa Lereng tahun 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya desa membuat persentase jiwa rata-rata yang banyak yaitu dari umur 26-55, sedangkan tingkat balita/anak-anak dan lansia mencapai persentase diatas 10% jadi dengan begitu tingkat kebersihan dan kesehatan didesa harus diperhatikan dengan baik agar masyarakat yang ada

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa tidak rentan terkena wabah-wabah penyakit yang menular dikarenakan tingkat immune dari balita/anak-anak dan lansia itu lemah, jadi pihak desa atau masyarakat desa harus cekatan mengutamakan kebersihan dan kesehatan yang ada di desa.

#### 4.4 Mata Pencaharian

Mata pencaharian ialah aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya, jadi mata pencaharian merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan tidak adanya mata pencaharian kita akan mengalami kesulitan didalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pentingnya suatu mata pencaharian bagi setiap orang untuk penghidupannya sehari-hari, berikut ini adalah mata pencaharian masyarakat didesa lereng:

**Tabel 4.6**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lereng**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	92 jiwa
2	TNI/POLRI	16 jiwa
3	Pegawai Swasta	156 jiwa
4	Pedagang	362 jiwa
5	Tani	365 jiwa
6	Pertambangan	132 jiwa
7	Pensiunan	64 jiwa
8	Nelayan	12 jiwa
9	Buruh Tani	253 jiwa
<b>Jumlah masyarakat desa lereng yang bekerja</b>		<b>1.452 jiwa</b>

Sumber: Kantor Desa Lereng tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwasannya mayoritas pecaharian penduduk di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

desa Lereng kebanyakan dari tani, ini disebabkan keadaan geografis yang ada di kabupaten kampar terdapat banyak lahan-lahan perkebunan, jadi dengan begitu terutama khususnya masyarakat di desa lereng tertarik dengan menjadi tani perkebunan, melainkan bisa untuk jadi penghasilan tiap bulannya, tentu juga akan menjadi suatu investasi jangka panjang, dan sebaliknya sangat sedikit sekali sebagai nelayan yang dikarenakan desa Lereng jauh dari perairan sungai Kampar untuk mencari ikan dan di jual di pasar-pasar seperti halnya nelayan pada umumnya.

#### 4.5 Agama Masyarakat Desa Lereng

Kehidupan agama sangat penting karena Agama merupakan tongkat untuk penunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma, dengan hidup beragama maka seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan agama yang dipercayai, melainkan sebagai penunjuk kejalan yang benar Agama juga sebagai tiang dari segala tiang didunia yang mana apabila tiang tersebut runtuh maka manusia berada pada kerugian.

Dengan pentingnya hidup berAgama Penduduk desa lereng 100% memeluk Agama yang mempercayai adanya Allah Swt, Agama yang menjalani perintah-perintah Allah Swt dan menjahui segala larangan Allah Swt, oleh karna itu Agama yang dianut oleh masyarakat desa Lereng adalah Agama Islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak terlepas dari sarana peribadatan di desa Lereng seperti berdirinya Masjid-masjid, Mushollah, Tk berbasis Islam, SD berbasis Islam atau di kenal dengan MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri),sekolah tingkat menengah atau yang disebut dengan MTS, TPA (Taman Pengajian AL-

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UR'AN), serta berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah atau dikenal dengan (MDA) dan selanjutnya mengadakan les mengaji gratis di masjid Istiqoma Desa Lereng tiap minggunya untuk kalangan semua umur dan di penuhi dengan tausyah atau wiritan tiap minggunya, dan ini semua kembali kepada setiap hambanya dan Allah Swt yang menilainya.

### 4.6 Pendidikan di Desa Lereng

Pendidikan merupakan sarana untuk untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu menjadikan manusia yang berkualitas dan yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, berakal dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Adapun tempat pendidikan yang berada di desa Lereng Adalah Sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Tempat Pendidikan di Desa Lereng**

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	MIN/MDA	2
3	MTSN	1
4	SMPN	1
5	SMAN	1

Sumber: Kantor Desa Lereng tahun 2020

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

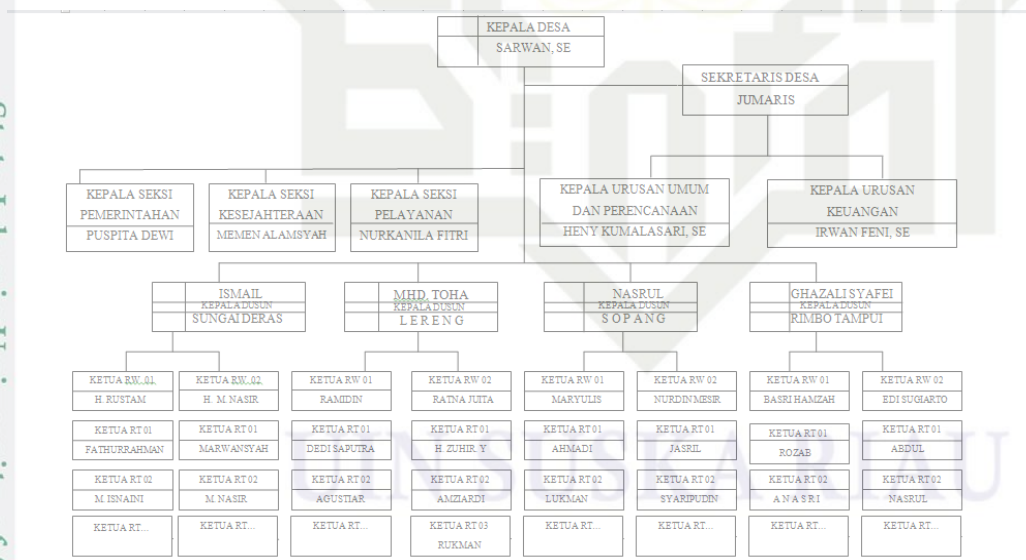
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari tabel diatas bahwasannya di desa lereng ini memiliki sarana pendidikan yang lengkap dan memadai mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah atas, sehingga masyarakat desa lereng tidak perlu jauh-jauh lagi untuk sekolah diluar desa.

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Demi Berjalannya suatu Pemerintahan di desa, tentu perlu adanya sebuah struktur di suatu Pemerintahan Tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yaitu tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan berikut adalah susunan atau struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Lereng :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lereng**



Dapat dilihat berdasarkan dari struktur organisasi pemerintahan desa lereng di atas yang di kepalahi oleh bapak Sarwan bahwasannya di desa lereng ini terbagi menjadi 4 dusun yaitu dusun lereng yang dijabat oleh saudara MHD.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taha, selanjutnya di dusun sungai deras yang dijabat oleh saudara Ismail, berikut di dusun Sopang yang dijabati oleh saudara Nasrul dan di dusun terakhir yaitu dusun Rimbo Tampui yang dijabati oleh saudara Ghazali Syafei.

### 8 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Anggota adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari Pemuka adat, pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan propesi, pemuka masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (Enam) Tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai KepalaDesa dan perangkat Desa. Berikut adalah struktur dari Badan Pengawasan Daerah desa lereng :

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi BPD Desa Lereng**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM merupakan Lembaga masyarakat yang ada di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan.

Tugas Pokok LPM adalah membantu Pemerintah Desa dalam:

- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa
- Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah
- Menggerakkan swadaya masyarakat
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.

Berikut adalah struktur organisasi LPM desa lereng :

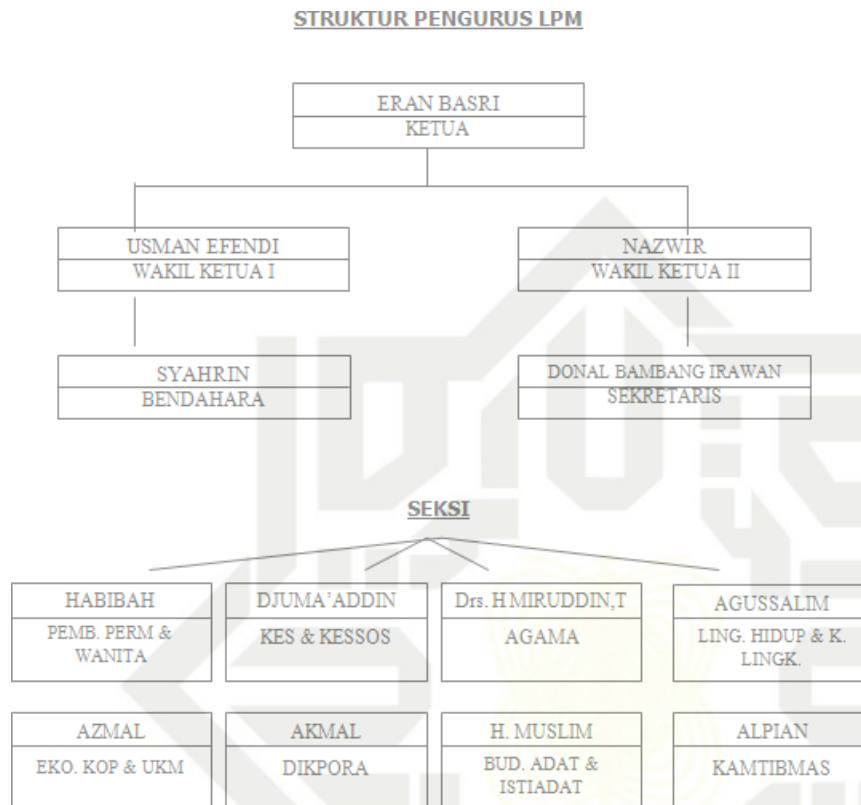
UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.3**  
**Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**



## 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya pemerintahan desa lereng didalam pengelolaan Dana Desa lereng sudah baik walaupun masih ada kekurangan.

Dikatakan dengan demikian karena didalam pemerintahan desa lereng masih ada kendala-kendala yang didapatkan dalam pengelolaan tersebut dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pengelolaannya, berikut adalah kekurangan pemerintahan desa lereng dalam pengelolaan Dana Desa di desa lereng kecamatan kuok kabupaten kampar :

1. Belum berjalannya sistem transparansi secara efektif, pemerintahan desa masi saja hanya memberikan informasi dengan sebatas baliho dan itu masi belum berjalan optimal karena baliho yang tidak diperbaharui tiap tahunnya dan tidak terpajang lama untuk dilihat oleh masyarakat desa.
2. Masi berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa lereng, kesibukan pribadi menimbulkan kurangnya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa lereng, padahal peran masyarakat sangat penting didalam pengelolaan tersebut.
3. Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis sudah baik, tetapi didalam hal pelaporan masih kurang baik dikarenakan masih adanya pegawai





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 6.2 Saran

desa yang bermalas-malasan didalam pekerjaannya menyebabkan kelambatan dalam pembuatan sebuah laporan yang akan diberikan kepada atasan ataupun masyarakat desa.

4. Pendapatan desa yang lemah, dalam pengelolaan yang kurang baik mengakibatkan pendapatan desa lereng lemah, banyaknya yang berhutang di minimarket desa tersebut menjadikan macetnya perputaran keuangan dan menjadikan pendapatan untuk desa juga akan menjadi berkurang atau terganggu.

Berdasarkan dari informasi-informasi yang penulis dapatkan saat dalam penelitian langsung ke obyek yang bersangkutan, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa lereng agar dapat memeberikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat agar terciptanya transparansi, serta bisa meningkatkan dalam memberikan informasi pengelolaan Dana Desa atau anggaran-anggaran lainnya lewat media sosial, dikarenakan masyarakat sudah bergantung dengan media sosial, selain informasi berbentuk baliho informasi melalui media sosial juga harus dijalankan dan dilakukan pembaharuan tiap tahunnya.

2. Diharapkan kepada pemerintah desa baik itu kepala desa dan sekretaris desa agar bisa berbuat tegas kepada staf-stafnya, supaya didalam kewajibannya sebagai seorang didalam pemerintahan desa tidak bermalas- malasan lagi dan bisa lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan kepada pemerintah desa lereng agar memperbaiki pengelolaan bumdesnya yang dalam bentuk minimarket, agar mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan yang sudah diperkirakan, maka seharusnya utang piutang didalam usaha tersebut ditiadakan agar perputaran keuangan dan pendapatan bisa menjadi lancar.
4. Diharapkan kepada pemerintah desa lereng bisa merangkul masyarakat agar dapat berpartisipasi atau berperan aktif didalam pengelolaan Dana Desa dan lebih memiliki rasa peduli didalam pembangunan desa.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan

Almasri dan Alkadafi, Muammar, 2018. "Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia". Cahaya Firdaus, Pekanbaru.

Puspawijaya, Adrian. Siregar, Julia, Dwi, Nuritha 2016. "Pengelolaan Keuangan Desa". Pusdiklatwas BPKP, Bogor.

Amin, dkk. 2012. "Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012". *Jurnal Kampus Bina Widya Univertas Riau*.

Shaha, Khalida. 2018 "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkuhan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)". Universitas Negeri Padang.

Ash-shidiqq, Ellectrananda, Anugerah. Wibisono, Hindrawan. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Desa". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131.

Liliana. Meutia, Inten. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 336-352. Palembang.

Hutami, Andi, SS. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Makassar 2017.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa



## DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : **Analisis Pengelolaan Dana Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**

Keterangan :

Wawancara ini hanya untuk melengkapi karya ilmiah dari penulis

Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak mempengaruhi terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/i

Atas partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/I saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Bapak/Ibu/Saudara/I selalu didalam lindungan Allah Swt

Identitas Peneliti :

Nama : Alfi Roza

Nim 11675102273

Jurusan : Administrasi Negara **Fakultas:** Ekonomi Dan Ilmu

Sosial **Universitas** : UIN Suska Riau Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

### PERTANYAAN

#### \*Perencanaan

1. apa tujuan dari perencanaan didalam pengelolaan dana desa ?
2. bagaimana mekanisme rancangan perencanaan pengelolaan dana desa ?
3. apakah dengan melakukan suatu perencanaan dapat meminimalisirkan anggaran biaya ?
4. bagaimana pihak desa menyatukan kebijakan atau pendapat dengan masyarakat yang ada disana?
5. apakah pihak desa dalam melakukan pengelolaan dana desa menggunakan prinsip dan teknis dalam penyusunan suatu anggaran ?
6. apakah didalam penyusunan rancangan-rancangan didalam sebuah perencanaan tersebut terdapat suatu hambatan ?

Sebutkan hambatan tersebut jika ada!

#### \*Pelaksanaan

1. melalui apa dana desa diterima dan siapa yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana desa jika terdapat suatu kesalahan ?
2. kapan pembuatan rencana anggaran biaya kegiatan itu dilakukan ?
3. apa saja kendala dalam pelaksanaan dana desa ?
4. adakah pengawasan yang dilakukan dalam melakukan pembangunan desa ?
5. apakah pelaksana bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan? Dan bagaimana bentuk tanggungjawab pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan ?

#### \*Penatausahaan

1. bagaimana pihak desa dalam mengelola keuangan desa ?
2. apakah pencatatan segera dilakukan setiap anggaran masuk dan keluar ?
3. kapan penutupan buku anggaran biaya itu dilakukan ?
4. siapa yang bertanggungjawab atas laporan pengeluaran dana desa tersebut ?
5. Bagaimana bentuk tanggungjawab yang akan diberikan ?

#### \*Pelaporan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

bentuk laporan lengkap yang diberikan kepada bupati/walikota, jadi apakah masyarakat desa juga mendapatkan laporan yang lengkap seperti yang diberikan kepada bupati/walikota tersebut?

bagaimana bentuk transparansi yang diberikan kepada masyarakat desa?

apakah setiap laporan-laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?

bagaimana bentuk tanggungjawab tersebut dan siapa-siapa saja yang akan bertanggungjawab ?

apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pembuatan pelaporan ?

\*Pertanggungjawaban

apakah bentuk pertanggungjawaban cukup dengan menyampaikan laporan kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran ?

2. apakah desa sudah memberikan rasa tanggung jawab dalam memberikan laporan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat dan orang banyak ?

3. apakah pemerintahan desa ini sudah mencapai pemerintahan yang akuntabel ?

\*Masyarakat

Bagaimana pandangan bapak terhadap adanya dana desa ?

Apakah di dalam pengelolaan dana desa ini masyarakat diikutsertakan?

Apakah transparansi itu terjadi secara umum mengenai laporan tentang dana desa ?

Apakah pemerintah desa sudah bijak dalam mengelola dana desa?

Apakah pertanggungjawaban pemerintahan desa sudah baik dalam mengelola dana desa?

Bagaimana bentuk transparansi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan dana desa?

Apakah masyarakat mengetahui nominal dan ada setiap tahunnya berapa banyaknya dan berapa-berapa saja yang terpakai?

Adakah masyarakat yang terjun langsung untuk mengawasi tahap-tahap dalam dana desa tersebut oleh pihak desa?



- Laporan-laporan yang seperti apa yang diterima masyarakat banyak?
10. Adakah pemerintah desa menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dana desa?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 : Wawancara Bersama Kepala Desa Lereng



Gambar 2. Wawancara Bersama Sekeretaris Desa Lereng

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara Bersama Bendahara Desa Lereng



Gmnbar 4. Wawancara Bersama Masyarakat Desa Lereng

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara Bersama Masyarakat Desa Lereng





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

© H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.VII/PP.00.9/359/2020

Biasa

Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Alfi roza  
NIM. : 11675102273  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Pengelolaan Dana Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten  
Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan  
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

UIN SUSKA RIAU

Dr. Drs. H. Muh/ Said HM, M.Ag, MPA  
NIP. 19620512 198903 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarung mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/1002/2020  
Biasa

Pekanbaru, 11 Februari 2020 M  
16 Jumadil Akhir 1441 H

Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. **Afrizal, S. Sos, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

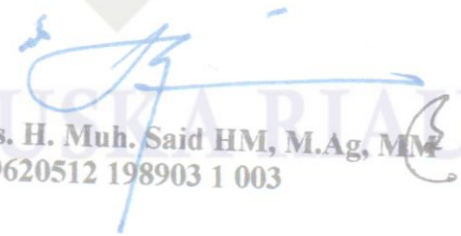
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Alfi roza
NIM	: 11675102273
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Dana Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

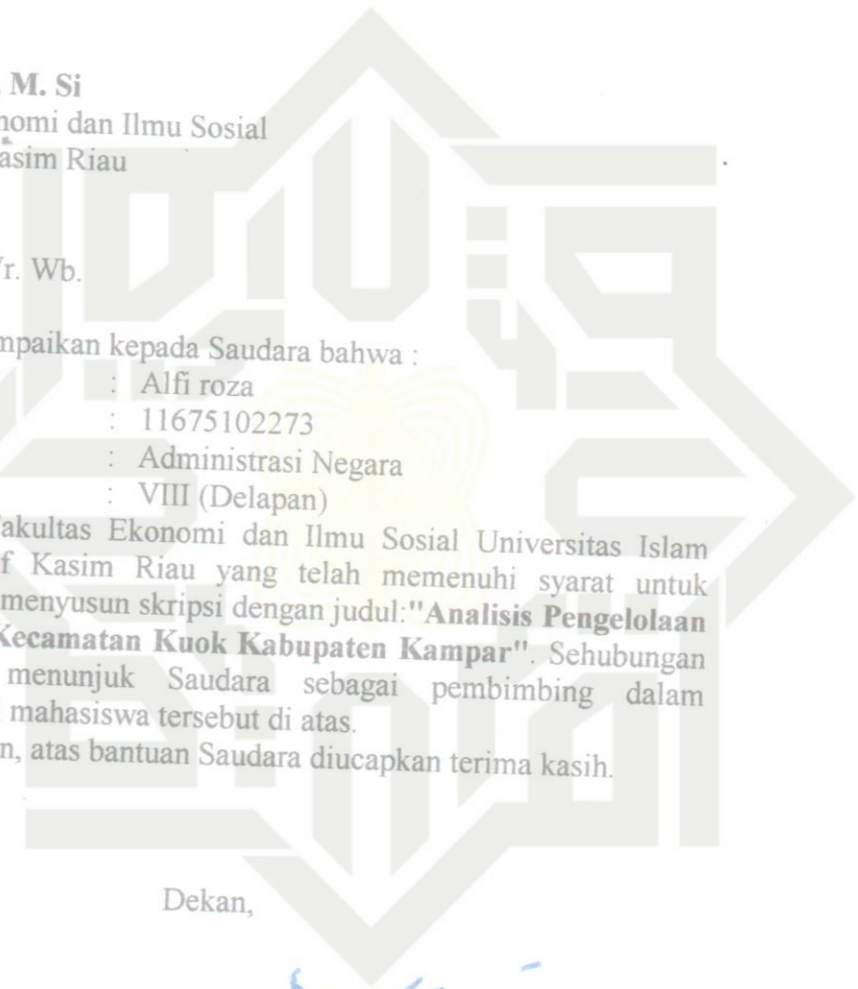
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30771  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU, Nomor :**  
**00.9/359/2020 Tanggal 21 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>ALFI ROZA</b>   |
| 2. NIS / KTP         | : | <b>11675102273</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>ADMINISTRASI NEGARA</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA LERENG KECAMATAN KUOK<br/>KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>KANTOR DESA LERENG</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai  
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan  
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**EVAREFITA, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720628 199703 2 004

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa  
menyebutkan sumber:  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
karya atau tujuan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DESA LERENG**  
KECAMATAN KUOK

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300/PEM/L/ 2021/ 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan Di bawah ini :

Nama : **JUMARIS**

Jabatan : Sekretaris

Dengan ini merangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama Lengkap : **ALFI ROZA**

Nomor Mahasiswa : 11675102273

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau-Pekanbaru

Benar telah selesai melakukan Penelitian di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar dengan Judul Penelitian "**Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar**"

Demikian surat Keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana perlunya .

Lereng, 18 Januari 2021  
an. Kepala Desa Lereng  
Sekretaris

  
**JUMARIS**



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Alfi Roza**, anak ke dua dari tiga bersaudara yang lahir pada tanggal 13 September 1997 dari pasangan ayahanda H. Zulfikri, S.Pd dan ibunda Hj. Endra Mainis. Dan memiliki tiga saudara bersaudara kandung yaitu Zela Indriani S.Gz, Qanita Adara Fikri.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2003 SDN 015 Pulau Terap I Kec. Kuok, Kab. Kampar RIAU. lulus tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan MTS Negeri Model Kuok, Kec. Kuok, Kabupaten Kampar dan lulus tahun 2012, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMK PGRI Bangkinang Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Muktisari Kec. Tapung Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.